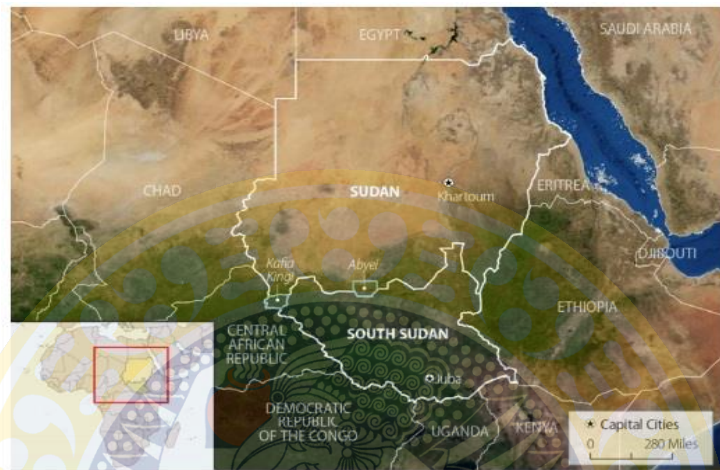


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Peta I. 1. Peta Sudan dan Sudan Selatan¹



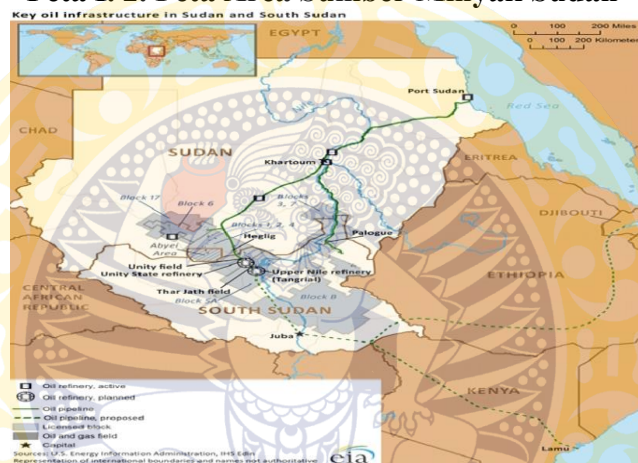
Setelah kemerdekaan, Sudan sebagai salah satu negara penghasil minyak dan uranium di Afrika mengalami permasalahan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang kompleks, hingga pada tahun 2011 wilayah Sudan Selatan memutuskan berpartisi. Pada tahun 1989, Omar Hassan al-Bashir menduduki pemerintahan Sudan melalui kudeta dan menjalankan politik sentralisasi domestik. Kebijakan tersebut tercermin dari keberadaan pusat ekonomi, lapangan pekerjaan serta perkembangan pendidikan yang hanya tersentral di Khartoum. Dampak sistem sentralisasi adalah kemunculan kondisi marginalisasi penduduk Sudan yang berada di luar Khartoum sebagai ibukota negara.² Selain itu, kemerdekaan Sudan tahun 1956 meninggalkan permasalahan identitas, Sudan disatukan melalui

¹ Congressional Research Service, *Sudan and South Sudan: Current Issues for Congress and U.S. Policy*, no. 42774 (October 5, 2012): 1, fig. 1.

² Marginalisasi membuat penduduk Sudan kehilangan hak dan kebebasan mereka seperti akses pendidikan dan pekerjaan serta pelayanan sosial. Kondisi tersebut menyulitkan kohesi domestik yang baik terbentuk bagi Sudan meskipun telah memperoleh kedaulatan negara. Dalam Tosterud A. Holte, "Chinese Intervention in the Second Sudanese Civil War" (master's thesis, University of Oslo, 2013), 3.

proses kolonialisasi, perang dan eksploitasi selama 200 tahun, sehingga integrasi wilayah tersebut mengalami hambatan etnisitas.³ Sensifitas religius juga terjadi, kawasan utara lebih didominasi oleh kaum Muslim-Arab, sedangkan area selatan mayoritas beragama Kristiani atau Animisme.⁴ Kompleksitas permasalahan di atas memicu pecahnya perang sipil⁵ di Sudan. Perang sipil dengan penyebab yang kompleks menandai dinamika negara Sudan. Latar belakang permasalahan teritorial sumber minyak menjadi penyebab dominan yang memperumit konflik⁶.

Peta I. 2. Peta Area Sumber Minyak Sudan⁷



³ Sudan dan Sudan Selatan memiliki diversifitas yang cukup tinggi, dimana terdapat 19 etnis dan hampir 600 sub-grup dalam kelompok-kelompok etnis tersebut. Sehingga terjadi kompetisi antara kelompok-kelompok etnis, agama dan ras yang secara internal menghambat integrasi persatuan Sudan. Dapat dilihat di Saferworld, *China and Conflict-Affected States: Between Principle and Pragmatism*, Saferworld Annual Report, no. 6 (December 20, 2012): 89-130.

⁴ Meskipun persoalan diversifikasi etnis menjadi permasalahan identitas utama, namun dikotomi religius yang ada dalam Sudan turut memperuncing konflik. Dalam Holte, "Chinese Intervention in the Second Sudanese Civil War", 5.

⁵ Small dan Singer dalam seminar *Resort to Arms: International Civil Wars* mendefinisikan perang sipil sebagai, perang atau konflik bersenjata yang melibatkan aksi militer internal negara terhadap metropole, peran aktif pemerintah nasional serta adanya resistensi yang efektif dari dua pihak yang berkonflik. Dalam Kelly Siegel. "UN Intervention in Civil War and Post-Conflict Economic Recovery" (master's thesis, New York University, 2010), 6.

⁶ Selama lebih dari dua dekade, persoalan minyak menjadi isu utama dalam perang sejak produksi minyak. Area sumber daya minyak menjadi medan perang hingga menewaskan puluhan ribu orang, dan banyak lagi yang harus mengungsi. CPA yang ditandatangani Pemerintah Sudan dan SPLM mengakhiri perang di Selatan, namun tiga tahun kemudian kembali menimbulkan ketegangan terkait batas teritori Utara-Selatan, pembagian pendapatan minyak, penerjunan militer serta transparansi industri minyak dibawah kesepakatan damai. Lihat European Union Coalition, *Sudan's Oil Industry: Facts and Analysis*, Annual Report, no. 33 (October 25, 2008): 31.

⁷ Peta dapat dilihat di Energy Information and Administration, "Sudan - South Sudan Analysis", 7 Oktober 2014, dalam <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=su> (diakses pada Januari 1, 2015).

Dua perang sipil terjadi antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak dari Sudan Selatan, yang pertama dalam kurun waktu 1955-1972 dan kemudian pecah perang sipil kedua di tahun 1983-2005.⁸ Pada tahun 1983 perang sipil kedua terjadi, dikomando oleh Sudan People's Liberation Movement (SPLM) bersama pasukan militernya yaitu Sudan People's Liberation Army (SPLA). Diawali dengan pergerakan pasukan gerilya Aya Nya melawan pemerintahan Sudan, kemudian diperparah dengan perebutan kawasan sumber minyak di Abyei, mengakibatkan perebutan wilayah penghasil minyak tersebut antara kedua pihak. Perang sipil Sudan menjadi perhatian dunia akibat pemberitaan internasional yang menyebutkan angka korban kematian mencapai dua juta jiwa, 50.000 korban anak-anak dan mengakibatkan setidaknya empat juta penduduk Sudan mengungsi ke negara-negara tetangga untuk meminta suaka.⁹ Jumlah korban yang semakin meningkat menunjukkan bahwa perang sipil yang terjadi di Sudan merambah kepada konflik kemanusiaan yang juga mengancam keamanan regional, mengingat bahwa Sudan merupakan negara dengan wilayah terbesar di regional Afrika. Hal tersebut disimpulkan sebagai aksi genosida oleh pemerintah dan kelompok aktivis Amerika Serikat,¹⁰ pemerintah AS menyatakan genosida telah terjadi di Sudan pada tahun 2004,

⁸ Perang sipil pertama disebabkan oleh ketimpangan yang dialami Sudan Selatan atas pemerintahan sentralisme, sehingga menimbulkan kekecewaan atas penolakan proposal otonomi Sudan Selatan. Perang ini kemudian diakhiri dengan ditandatangani *Addis Ababa Accord* pada tahun 1972. *Addis Ababa Accord* adalah untuk menginisiasi rencana menuju perdamaian Sudan dalam sebelas tahun kedepan, sekaligus membagi wilayah Sudan Selatan menjadi tiga area otonomi. Dalam Energy Information and Administration, "Sudan - South Sudan Analysis."

⁹ Lihat European Union Coalition, *Sudan's Oil Industry: Facts and Analysis*, 35.

¹⁰ Kelompok aktivis "Save Darfur" memberi keterangan bahwa dalam konflik Sudan di area Darfur telah terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan malnutrisi hingga jutaan orang. Kelompok aktivis ini kemudian menjadi aktor pendorong pemerintah AS untuk bertindak dalam konflik Sudan (Darfur) tersebut melalui langkah *humanitarian intervention* berupa pendanaan bagi tindakan preventif terhadap perang sipil serta penerjunan tentara *peacekeeping*. Dalam Marc Gustafson, "Genocide in Darfur Isn't What It Seems", 19 August 2009, <https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/sudan/51976-sudan-and-south-sudan-a-civilised-divorce.html> (diakses pada Januari 15, 2015).

The violence has been carried out with such coordination, intensity, and focus on particular ethnic groups that the U.S. government, though reluctant to commit itself to action, declared in 2004 that “genocide has been committed in Darfur” and “may still be occurring.”¹¹

Kondisi krisis kemanusiaan semakin memperlebar dinamika konflik serta potensi intervensi pihak ketiga melalui peranan dari beberapa pihak eksternal. Beberapa pihak eksternal yang kemudian terlibat dalam konflik dengan kapasitas tertentu antara lain PBB, Uni Afrika, AS, Ethiopia, Uganda, Norwegia, Inggris dan Tiongkok.¹² Dari beberapa aktor tersebut, PBB, Uni Afrika, AS dan Tiongkok menjadi empat aktor yang berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik Sudan. Dalam situasi tersebut, PBB merupakan aktor penyelenggara intervensi kemanusiaan terhadap Sudan melalui pengiriman pasukan perdamaian antara lain United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) atau United Nations Missions in Sudan (UNMIS) dan United Nations Mission in Darfur (UNAMID).¹³ Sedangkan Uni Afrika (UA) berperan sebagai organisasi regional kawasan Afrika yang memediasi antara Sudan dan Sudan Selatan serta meminta Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh terhadap Sudan agar menerima pasukan perdamaian PBB-UA sebagai bentuk penegakkan perlindungan kemanusiaan.¹⁴ Namun terdapat dua aktor yakni AS dan Tiongkok, yang terlibat dalam konflik Sudan-

¹¹ Sebagaimana yang dikatakan Powell, salah satu staff Departemen Pertahanan AS. Lihat Adam Keith, “The African Union in Darfur: An African Solution for Global Problem”. (master’s thesis, Princeton University’s Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, 2008): 154.

¹² Uganda menjadi negara tetangga wilayah Sudan Selatan yang turut menyediakan senjata perang bagi SPLA. Sedangkan Norwegia memberikan sokongan finansial bagi SPLA. Kemudian Ethiopia menjadi sponsor pelatihan terhadap pasukan pemberontak SPLA, sementara Inggris adalah negara yang mendukung pelaksanaan CPA. Bersumber dari laporan kantor berita Nuba, Sudan dalam Nuba Reports, “Global Players”, 23 September 2011, <http://nubareports.org/global-players>. (diakses pada Januari 15, 2015).

¹³ Siegel, “UN Intervention in Civil War and Post-Conflict Economic Recovery”, 16-17.

¹⁴ Sebagaimana yang dikutip dalam piagam Uni Afrika, “The AU’s Constitutive Act articulates a strong commitment to human rights. The charter also gives the AU the authority to back up that commitment with action, explicitly providing for [t]he right of the Union to intervene in a Member State...in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against humanity” (Article 4h). Given the record of their predecessors, African leaders seemed to have “slaughtered a holy cow” by taking even a declaratory step in this direction”. Dalam Keith, “The African Union in Darfur: An African Solution for Global Problem”, 154.

Sudan Selatan dan membentuk dinamika menarik untuk dikaji terkait kebijakan partisi sebagai proses perdamaian setelah perang sipil kedua.

Dinamika perang sipil Sudan memasuki masa baru ketika ketegangan dua wilayah diredam melalui penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA)¹⁵ kedua pihak yaitu pemerintah Sudan dan SPLM. Kemudian diikuti penurunan pasukan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Missions in Sudan (UNMIS)¹⁶ yang menandai masuknya campur tangan pihak eksternal ke area konflik secara resmi. Selama perang sipil Sudan berlangsung hingga proses pengiriman pasukan UNMIS, AS dan Tiongkok sebagai dua negara *greatpowers*¹⁷ memiliki hubungan yang bersifat bertentangan dengan Sudan. Dominasi dua negara tersebut dalam UNMIS menjadi logis apabila melihat dinamika historis kedekatan AS-Sudan Selatan dan Tiongkok-Sudan serta jumlah instrumen (militer, dana, asistensi pembangunan hingga penegakan hukum) yang mampu didistribusikan kedua negara melalui UNMIS,¹⁸ sehingga

¹⁵ *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dipelopori oleh AS, Inggris dan Norwegia, dan mengatur empat hal utama yaitu pembagian kekuasaan terutama dalam standar penerimaan minyak, pengaturan mobilisasi massa dan penyelenggaraan perdamaian serta pembanguan demokrasi melalui referendum. AS merupakan pemain kunci intervensi humaniter di Sudan, Inggris merupakan patron imperialisme Sudan serta Norwegia sebagai pendonor finansial SPLA. Dalam Nuba Reports. "Global Players".

¹⁶ Dewan Keamanan melalui Resolusi PBB nomor 1590 pada 24 Maret 2005 memutuskan pembentukan UNMIS untuk mendukung implementasi CPA yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan SPLM pada 9 Januari 2005, serta melaksanakan fungsi terkait asistensi kemanusiaan dan proteksi HAM. UNMIS menyediakan dukungan politik, pengawasan keamanan dan pembangunan kepada masing-masing pihak dalam proses damai. Dapat dilihat di situs United Nations. "UNMIS Mandate", updated in 2015, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/reports/mandate.shtml>. (diakses pada Januari 16, 2015).

¹⁷ Negara yang dimaksud *greatpower* disini adalah negara dengan *relative power* yang cenderung lebih kuat dibanding negara lain. Intervensi tersebut mampu meningkatkan *relatif power* dalam berkonflik jika intervensi tersebut dilakukan oleh pihak yang juga memiliki kekuatan relatif lebih besar. Sehingga dominasi akan mampu dilakukan oleh negara-negara superpower dalam proses intervensi. Dalam Patrick M. Reagan. "Third-party Interventions and the Duration of Intrastate Conflicts" *Journal of Conflict Resolution*, 46 (November 2002): 61-63.

¹⁸ Penyelenggaraan UNMIS tahun 2005 menelan sumber daya dana mencapai 1.76 milyar dollar AS, tentara militer sebanyak 8.554 orang, tentara *joint comission* sebanyak 39.639 orang dan staf ahli hingga 534. Dimana hampir 28persen dari jumlah instrumen finansial tersebut dikirimkan oleh AS. Sementara Tiongkok lebih fokus pada bantuan senjata dan 900 pasukan bagi Sudan, yang diharapkan mampu mempertahankan legitimasi Sudan. Di satu sisi AS memiliki kedekatan hubungan dengan Sudan Selatan dan sejak perang sipil pertama terjadi. Sedangkan Tiongkok memposisikan diri sebagai klien utama hasil minyak Sudan sekaligus sebagai negara yang memiliki kedekatan diplomatik sejak tahun 1989 (kudeta pemerintahan oleh Omar al-

muncul kepentingan langsung antarpihak. Terdapat beberapa keunikan dalam misi perdamaian UNMIS yaitu, 1) Tiongkok untuk pertama kali ikut ambil peran dalam intervensi kemanusiaan dengan mengirimkan pasukan militer dalam jumlah besar hingga mencapai rata-rata 2.300 personel dari tahun 2007-2011. Sebelumnya Tiongkok berpegang pada prinsip non-intervensi dan memilih abstain atau hanya mengirim polisi sipil dalam jumlah kecil dalam operasi *peacekeeping* PBB;¹⁹ 2) AS yang sebelumnya tidak terlalu menghiraukan sikap abstain Tiongkok dan hanya mengirimkan teguran melalui Dewan Keamanan PBB, kemudian berupaya mengikutsertakan Tiongkok dalam UNMIS karena melihat kedekatan Tiongkok dengan Sudan dapat menjadi kekuatan pemaksa; 3) bergabungnya dua negara tersebut dalam UNMIS diharapkan menghilangkan anggapan internasional terkait *proxy war* antara Sudan dengan Sudan Selatan yang didalangi oleh AS dan Tiongkok. Sehingga proses UNMIS dalam konflik Sudan-Sudan Selatan cukup dinamis.

Dinamika berjalannya UNMIS terutama didominasi oleh peranan AS dan Tiongkok. AS dengan tegas menjadi pendukung utama pengiriman pasukan *peacekeeping* UNMIS dalam rangka intervensi kemanusiaan²⁰ sekaligus secara unilateral menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi kepada Sudan.²¹

Bashir) hingga perang sipil II. Lihat International Crisis Group, *Sudan's Comprehensive Peace Agreement: Beyond The Crisis*, no.50 (Maret 13, 2008):13.

¹⁹ Data selengkapnya dalam United Nations. "UN's Missions SUMMARY Detailed by Country", updated in 2015, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis>. (diakses pada Januari 16, 2015).

²⁰ Staff AS untuk PBB mengatakan bahwa AS akan mengikuti langkah tegas PBB dalam mempersiapkan tindakan sanksi dan pencegahan kekerasan lebih lanjut yang terjadi di area Darfur dalam konflik Sudan-Sudan Selatan yang telah menewaskan warga sipil. Dalam Mohamed Osman, "China Urges Sudan to Accept UN Troops", 10 April 2007, <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/206/39756.html>. (diakses pada 17 Januari 2015).

²¹ Kebijakan *Sudan Sanction* yang dikeluarkan tahun 2006 oleh *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat berbentuk embargo ekonomi terhadap Sudan. Presiden Bush menyebut dengan *Sudan Sanction*. Kebijakan *Sudan Sanction* mengecualikan Sudan Selatan, yang notabene sebagai wilayah kaya akan minyak 98persen dari total eksplorasi di kawasan Sudan serta memuat 70persen kawasan yang dapat dikultivasi. Sehingga terjadi kemerosotan terhadap perekonomian Sudan secara

Sementara Tiongkok mengambil posisi resisten terhadap pemberian sanksi terhadap Sudan dan memproklamlirkan kebijakan non-intervensi atas kedaulatan negara lain termasuk Sudan, namun fakta memperlihatkan pergerakan Tiongkok justru sebagai pihak ketiga yang mengintervensi dan kehilangan netralitas. Tiongkok sempat menolak untuk mendukung pengiriman pasukan perlebaran UNMIS ke Darfur di tahun 2006, memberikan bantuan berupa dana, penyediaan air dan listrik sebesar 11.65 juta dolar di tahun 2008, bahkan Tiongkok juga berupaya menjaga agar konflik Sudan tetap menjadi urusan internal negara dengan menyuplai pasukan kompi kecil bagi Khartoum.²² Oleh karena itu, dinamika sikap AS dan Tiongkok dalam mendominasi misi perdamaian UNMIS yang akhirnya menghasilkan partisi Sudan perlu dikaji lebih lanjut.

UNMIS sebagai misi perdamaian yang juga dikonfigurasi oleh dua negara besar yaitu AS dan Tiongkok memicu dinamika peran dibandingkan dengan ketika perang sipil di Sudan berlangsung. AS yang sejak awal mendekati diri ke kubu Sudan Selatan semakin memberikan tekanan pada Khartoum untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan perdamaian melalui embargo dan intervensi militer, kemudian berubah mulai mempertimbangkan jalur negosiasi dengan pemerintahan Sudan terkait demokratisasi Sudan Selatan. AS kemudian memperlunak sikap terhadap Sudan dengan mengadakan dialog multilateral antara Sudan (Khartoum), Tiongkok dan Mesir untuk membicarakan tindak lanjut upaya perdamaian, referendum yang adil di Sudan Selatan, mekanisme investasi minyak serta penanganan krisis kemanusiaan saat CPA

signifikan. Dalam Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, United States of America, *An Overview of Sudanese Sanctions Regulations*, no. 3266 (January 9, 2008): 5-10.

²² Dapat dilihat selengkapnya terkait data, lihat Gaafar A. Kaarar, "The Chinese Stance on Darfur Conflict" (paper presented at *Occasional Paper No. 67 of The South African Institute of International Affairs Conference (SAIIA)*, September 2010), 5-28.

berlangsung.²³ Sedangkan Tiongkok yang selama perang sipil berlangsung berperan sebagai aliansi bilateral bagi pemerintah Sudan pada akhirnya mempersuasi Khartoum untuk menerima pasukan perdamaian PBB berdasarkan persoalan isu genosida.²⁴ Bahkan Tiongkok yang sempat menolak mengirim pasukan di tahun 2006, pada akhirnya mengirimkan pasukan militer untuk mendukung UNMIS sebanyak 457 orang dan 435 prajurit sipil di tahun 2008.²⁵

Dinamika intervensi eksternal yang dilakukan oleh AS dan Tiongkok dalam konflik Sudan-Sudan Selatan memiliki urgensi untuk dikaji melalui tiga sudut pandang, yakni Sudan dan Sudan Selatan sebagai kesatuan negara yang strategis dari segi geopolitik, hubungan internasional dengan AS dan Tiongkok sebagai negara intervensi serta sudut pandang perluasan penelitian. Dari sudut pandang internal, Sudan dan Sudan Selatan diproyeksikan sebagai *pivot area* baru karena kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas alam, berlian, emas dan bahan tambang serta mineral lain²⁶, sehingga muncul banyak persoalan yang didasari perebutan sumber daya alam. Letak geografi yang strategis bagi regional Afrika sebagai jalur pelayaran komoditas perdagangan internasional antara Eropa dan Asia turut menjadi daya tarik Sudan melalui Port Sudan sejak zaman kolonial.²⁷

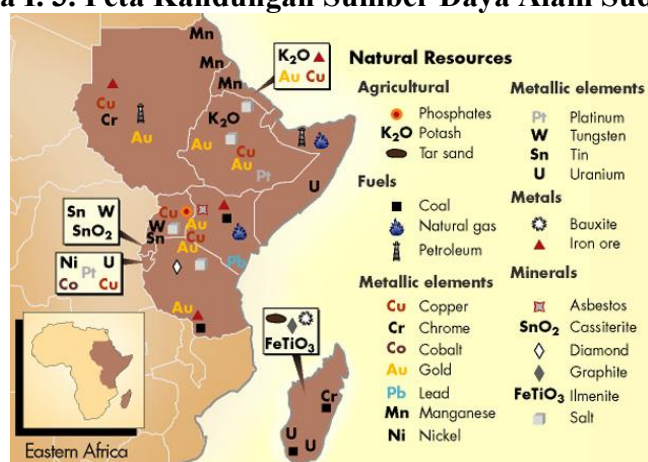
²³ Meskipun demikian, Khartoum akan melawan tekanan internasional dengan mempertahankan dukungan dari sekutu bilateral yakni melalui investasi komersial Tiongkok dalam kerjasama industri minyak. Dukungan Mesir dan Arab Saudi sangat penting untuk keamanan nasional re-im pemerintahan Sudan. Keduanya penting sebagai mitra Khartoum saat referendum di selatan. Lihat penjelasan dalam Council of Foreign Relations, *Renewed Conflict in Sudan, Contingency Planning Memorandum*, no. 7 (August 15, 2010): 8-10.

²⁴ Kaarar, "The Chinese Stance on Darfur Conflict", 10.

²⁵ Council of Foreign Relations, *Renewed Conflict in Sudan, Contingency Planning Memorandum*.

²⁶ *United Nations Millennium Development Goals* memandang Afrika sebagai "new frontier of development". JP Morgan menyatakan bahwa Afrika memiliki potensi besar akan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terus dijaga. The Boston Consulting Group juga menyatakan hal yang kurang lebih sama, bahwa nilai ekspor Afrika cukup tinggi (18 persen) dibandingkan kawasan lain, dan 500 perusahaan besar Afrika mencapai pertumbuhan lebih dari 8 persen sejak tahun 1998.

²⁷ Leroy Vail. "Mozambique's Chartered Companies: The Rule of the Feeble" *The Journal of African History*, 17 (1976): 389-392.

Peta I. 3. Peta Kandungan Sumber Daya Alam Sudan²⁸

Sedangkan dari sudut pandang eksternal, dinamika aksi-reaksi dua negara adidaya yakni AS dan Tiongkok melalui UNMIS dalam mempengaruhi proses partisi Sudan dengan Sudan Selatan belum banyak dibahas. Literatur yang ada cenderung melihat satu aktor yang menjadi pemain vital dalam mengarahkan partisi kedua wilayah tersebut. AS disebut sebagai *godfather of partition*,²⁹ karena dukungan kepada Sudan Selatan selama dua dekade terakhir menuju keputusan referendum bagi kedaulatan Sudan Selatan, serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan literatur di atas, Tiongkok juga dinilai sebagai aktor vital dalam memengaruhi dinamika konflik Sudan-Sudan Selatan, Sudan dilihat sebagai klien kerjasama yang strategis dalam hal investasi sejak tahun 1990-an.³⁰ Dalam tulisan lain juga disebutkan bahwa Tiongkok memiliki relasi bilateral yang kuat dengan Sudan sejak tahun 1959.³¹ Keterkaitan antara perbedaan dan perubahan sikap dua negara besar yakni AS dan Tiongkok di

²⁸ New Basic Site, *Sudan and Darfur: The Conflict in Sudan, Explain*.

²⁹ El-Nour T. Khaleed "South Sudan: Post-independence Opportunities and Challenges" *Al Jazeera Centre for Studies*, July 25, 2011, 5.

³⁰ Tiongkok memiliki investasi sebesar 4 juta US\$ pada industri minyak Sudan dan mengimpor 60persen hasil produksinya pada tahun 2008. Lihat Ben Wang, *China's Oil Diplomacy and State-Backed Investments in the Partition of Sudan* (Chentelham: Lynne Rienner Publishers Print, 2013), 2.

³¹ Tiongkok menunjukkan kedekatan dengan Sudan sejak tahun 1989 (terjadi kudeta pemerintahan dan kedudukan didapatkan oleh Omar al-Bashir) dan terus menjalin hubungan baik hingga perang sipil II. Lihat sejarahnya dalam Abadada A. Ali, *The Sudanese-China Relations: Before and After Oil* (Khartoum: Sudan Press, 2006), 47.

konflik Sudan – Sudan Selatan dalam proses perdamaian CPA yang didukung UNMIS hingga hasil referendum yakni partisi diberlakukan pada 9 Juli 2011 menandai kedaulatan Sudan Selatan sebagai negara baru, membentuk sebuah dinamika yang menarik untuk dikaji.

I.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diteliti lebih lanjut oleh peneliti adalah, mengapa dinamika peranan AS dan Tiongkok melalui United Nations Missions in Sudan (UNMIS), dalam mengintervensi konflik antara Sudan-Sudan Selatan mendorong hasil referendum pada keputusan partisi tahun 2011?

I.3 Kerangka Pemikiran

I.3.1 Relasi Negara Lemah dan Inkongruen dengan Intervensi Kooperatif

Negara gagal diindikasikan dengan dua kondisi yakni lemah dan tidak kongruen atau juga disebut dengan *state-to-nation imbalance*. Negara lemah tidak memiliki efektivitas dalam menjalankan institusi sehingga kehilangan peran dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara, termasuk ketidakmampuan menegakkan pemaksaan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya kekerasan pada masyarakat sipil hingga mencanangkan pembangunan negara melalui birokrasi dengan baik. Sedangkan negara yang inkongruen diidentifikasi dengan kaitan antara rasio batas geopolitic dengan aspirasi masyarakat, terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan berkuasa, sehingga memunculkan tantangan berupa *self-determination*, yakni kondisi yang menuntut pemisahan diri dan penyelenggaraan negara baru yang merdeka sebagai

bentuk kedaulatan menentukan nasib sendiri.³² Kondisi tersebut akan melahirkan kelompok revisionis³³ yang melihat perang sebagai upaya maksimalisasi *power* dan profit melalui bantuan pihak ketiga.³⁴ Bosnia, Kongo dan Liberia termasuk dalam kategori negara lemah dan inkongruen.

Kapabilitas negara lemah dan kondisi nasional yang inkongruen mengundang pihak ketiga untuk menghentikan perang sipil melalui instrumen intervensi kooperatif.³⁵ Intervensi kooperatif yang masuk tidak bersifat pasif, sehingga memungkinkan adanya perubahan bentuk, struktur maupun perluasan jangkauan dalam melaksanakan intervensi kooperatif tersebut. Regional dengan tingkat negara lemah dan inkongruen yang tinggi akan berbanding lurus dengan kecenderungan perang sipil domestik dan keterlibatan pihak ketiga secara kooperatif.³⁶ Motif utama yang menyebabkan kondisi nasional inkongruen adalah persengketaan teritori yang memiliki sumber daya alam, persoalan batas negara dan pembentukan negara baru,³⁷ sehingga intervensi kooperatif adalah instrumen untuk mewujudkan motif tersebut. Semakin tidak seimbang kondisi dari sebuah negara-bangsa, maka kelompok pemberontak atau revisionis yang berupaya memisahkan diri juga akan semakin kuat, ditambah lagi dengan peranan *great powers* yang mengintervensi secara kooperatif memiliki kapabilitas memberi

³² Semakin lemah suatu negara, tantangan dari kelompok subnasional tersebut akan semakin kuat. Dapat dilihat di Van Evera, 1994 dan Hugh Seton-Watson 1997, 3. Dalam Benjamin Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, (New York: Cambridge University Press, 2007), 54-60.

³³ Kelompok revisionis adalah kelompok yang tidak puas dengan legitimasi dan kedaulatan negara yang ada, sehingga berupaya mendapatkan bantuan dari pihak eksternal untuk menantang legitimasi yang ada. Dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 106.

³⁴ Lihat Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 123.

³⁵ Tipe intervensi berupa kooperatif menitikberatkan pada kesepakatan adanya tujuan bersama dari intervener dalam wilayah tersebut dan berupaya bekerjasama secara afirmatif melalui koordinasi diplomatik, ekonomi hingga militer. Lihat Spiegel 1972, 145-165 dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 62-67.

³⁶ Lihat proposisi 2 dan Appendix B, dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 112-115.

³⁷ Lihat tabel 3.2 state and regional proneness: the effects of state-to-nation congruence and of state strength, dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 101.

sokongan persenjataan, asistensi konstitusional, pasukan militer, persediaan logistik hingga pendanaan kepada pihak tertentu.³⁸

Konflik akan semakin tajam apabila setiap kubu memiliki patron masing-masing, karena kondisi perang sipil menunjukkan ketimpangan kekuatan antara kelompok pemberontak dengan pemerintahan berkuasa.³⁹ Sehingga kemungkinan integrasi atau komitmen negosiasi antara pihak yang bersengketa akan sulit dilakukan, namun juga tidak akan memenangkan salah satu pihak secara mutlak. Perdamaian juga akan sulit diraih jika patron terus mendukung salah satu pihak, terutama dalam isu-isu fundamental seperti upaya mempertegas batas wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Oleh karena itu, intervensi dibutuhkan untuk mereduksi kompleksitas konflik yang disebabkan oleh kondisi negara yang lemah dan inkongruen serta keberadaan patron.

1.3.2 Keterkaitan Intervensi Kooperatif *Great Power*, *Cold Peace* dan Partisi

Dalam kondisi yang lemah dan inkongruen atau disebut *state-to-nation imbalance*, alternatif tipe intervensi kolektif dari *great powers* yang dalam level tertentu mampu mengawali pembentukan resolusi konflik adalah tipe intervensi kooperatif. Tipe intervensi kooperatif tersebut akan menghasikan *cold peace*⁴⁰

³⁸ Secara normatif, pemerintah memiliki kekuatan lebih besar dibanding pemberontak melalui kedaulatan wilayah, basis militer dan legitimasi kebijakan. Akan berbeda apabila kelompok pemberontak menerima sokongan persenjataan, pasukan, logistik hingga pendanaan dari pihak ketiga yang dapat mengancam pihak pemerintahan. Dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 19.

³⁹ Dukungan ini dapat dikategorikan sebagai intervensi dalam konflik dan menyulut pihak musuh melakukan hal yang sama. Dalam Clayton Govinda, "Relative Rebel Strength and the Onset and Outcome of Civil War Mediation" *Journal of Peace Research*, 50 (April 2013): 609 -622.

⁴⁰ Cold Peace merupakan kondisi dimana penggunaan kapasitas militer dalam konflik berkurang, namun masih mungkin terjadi salam jangka panjang apabila masalah utama belum terselesaikan. Sehingga tahap *cold peace* merupakan pendahuluan dari tahap perdamaian selanjutnya. Tahap perang menuju perdamaian dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yakni hot war, cold war, cold peace, warm peace, normal peace dan high-level peace. Lihat Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 44-47.

yang kemudian dapat mengarah ke beberapa mekanisme meliputi *reassurance*, *deterrence*, *restraint*, reduksi konflik dan pelaksanaan referendum.⁴¹ *Reassurance* berkaitan dengan jaminan keamanan wilayah konflik melalui penurunan tentara perdamaian. Kemudian *deterrence* dilakukan untuk membendung kekuatan agresor yang berpotensi menyulut konflik bersenjata atau perang. Yang dimaksud *restraint* adalah situasi agresif dari intervensi yang menekan aktor lokal melalui sanksi dan perubahan posisi diplomatik. Sedangkan mekanisme reduksi konflik memiliki dua langkah yakni mediasi dan penyelenggaraan kesepakatan antarpihak hingga terlaksana referendum sebagai mekanisme terakhir.

Intervensi kooperatif mampu menyelenggarakan mitigasi dan mengupayakan reduksi konflik dengan kapabilitas pihak yang mendominasi intervensi, sehingga semakin kuat pihak yang mengintervensi (*great powers*), maka prospek keberhasilan penyelenggaraan *cold peace* akan semakin besar. Tujuan utama tipe intervensi kooperatif adalah melahirkan situasi *state-to-nation balance* melalui pembentukan *cold peace*, meskipun belum menghapuskan kemungkinan perang sipil kembali terjadi.⁴² Tentunya ada upaya untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang melalui kebijakan tertentu setelah proses *cold peace* usai. Salah satu kasus yang menggambarkan kondisi intervensi kooperatif yang menghasilkan *cold peace* adalah konflik di Angola, Mozambik, Afghanistan dan Kamboja yang melibatkan akomodasi antara AS dan Uni Soviet.

Intervensi kooperatif yang menghasilkan *cold peace* dalam konflik negara lemah dan inkongruen mendorong negara tersebut mengambil keputusan partisi.

⁴¹ Kelima mekanisme tersebut menjadi karakteristik dari tipe intervensi kooperatif, dimana yang ditekankan adalah pengadaan negosiasi diplomasi untuk perdamaian antara aktor lokal yang berkonflik dengan *great powers*. Sehingga akan muncul banyak kompromi hingga arahan dari kekuatan dominan dalam intervensi karena negara lemah dan inkongruen tidak memiliki pilihan untuk melawan. Lihat Snidal, 1985 dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 218.

⁴² Lihat Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 67-80.

Peranan intervener berpotensi menghentikan perang sipil, menjamin keamanan, mengatur kesepakatan perdamaian, memisahkan kekuatan rival, memonitor pelucutan dan genjatan senjata, menjalankan proses perdamaian melalui kebijakan partisi, seperti yang terjadi Ireland tahun 1921 atau Cyprus tahun 1974. Apabila *great powers* kemudian melepaskan diri dari intervensi kooperatif maka proses perdamaian akan gagal, seperti di kasus Perjanjian Oslo antara Palestina-Israel (1990). Hal tersebut terjadi karena bantuan⁴³ dari *great powers* mampu meningkatkan kapabilitas negara lemah dan inkongruen dalam partisipasi proses resolusi konflik, yakni melalui partisi. Kelompok revisionis menuntut partisi sebagai bentuk *self-determination* yang menurut kaum realis merupakan solusi praktis mengakhiri perang sipil, sekaligus upaya mereduksi dilema keamanan antarpihak.⁴⁴ Pada dasarnya, alasan utama perang tidak dapat dilepaskan dari tujuan memperoleh kedaulatan, baik kedaulatan wilayah, kedaulatan identitas maupun kedaulatan sumber daya alam,⁴⁵ sehingga kemungkinan opsi partisi akan terus ada dalam proses memperjuangkan kepentingan tersebut.

I.4 Hipotesis

Keputusan partisi Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011 disebabkan oleh beberapa kondisi yang mendeterminasi yaitu, 1). Situasi negara Sudan yang lemah dan inkongruen mengundang kehadiran pihak ketiga melalui instrumen intervensi kooperatif, dimulai dari pembentukan *cold peace* yaitu *Comprehensive Peace*

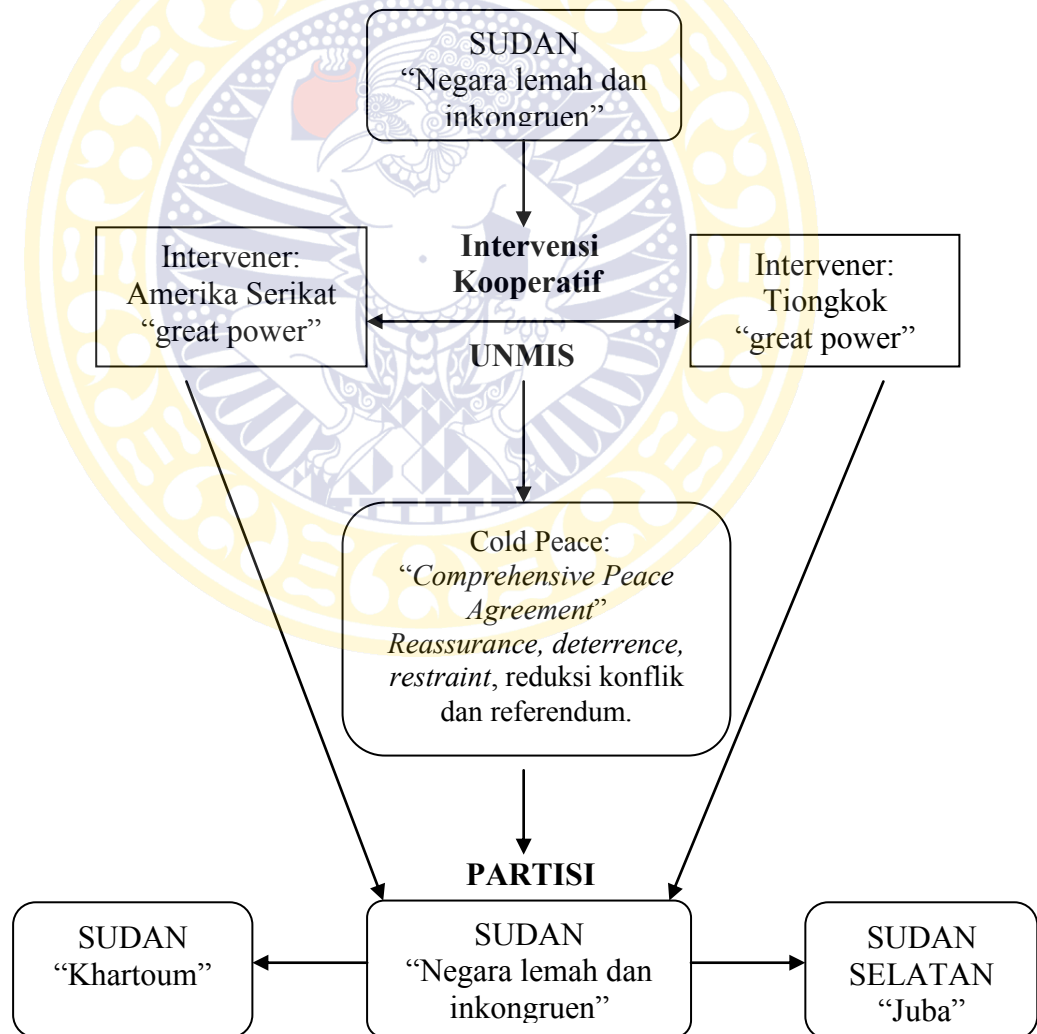
⁴³ Termasuk pendanaan, keamanan, kekuatan politik dan asistensi konstitusional serta perlindungan HAM.

⁴⁴ Namun apabila diteliti lebih lanjut, partisi justru akan membuat konflik semakin permanen karena akan muncul manipulasi fleksibilitas etnis serta memunculkan ancaman integritas teritorial bagi negara tetangga dan merombak tataran sistem internasional dengan memunculkan negara kecil baru. Argumentasi Kaufman dan Downes dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 400.

⁴⁵ David Boucher, *Political Theories of International Relations* (United States: Oxford University Press, 1998), 243.

Agreement yang kemudian diperlebar dalam bentuk UNMIS yang didominasi dua *great powers* yaitu AS dan Tiongkok, 2). Dinamika intervensi kooperatif pihak ketiga oleh dua aktor *great power* yakni AS dan Tiongkok dalam UNMIS untuk melaksanakan *Comprehensive Peace Agreement*, melalui mekanisme *restraint*, *reassurance*, *deterrence* dan reduksi konflik. Sehingga dinamika intervensi kooperatif AS dan Tiongkok melalui UNMIS yang menghasilkan *cold peace* berupa CPA mempengaruhi terselenggaranya pembentukan negara baru melalui proses partisi.

I.6 Diagram Visualisasi Pemikiran



I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

I.6.1.1 Negara Lemah dan Inkongruen

Negara lemah dapat didefinisikan sebagai negara yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi institusi pemerintahan serta ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya alam negara untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang dicanangkan pemerintah justru menyulut konflik. Kekerasan akibat konflik teritori dan lemahnya penegakkan sistem hukum menjadi ciri dari negara lemah, sehingga negara lemah dapat dikatakan dalam kondisi tidak mampu menjaga keteraturan dan keamanan teritorial negara.⁴⁶ Indikator negara lemah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kecil, kemacetan pajak negara, terjadi konflik bersenjata di teritorial tertentu, birokrasi tidak efektif dalam menyediakan jasa bagi masyarakat seperti ketersediaan air, listrik, pendidikan, kesehatan, teknologi komunikasi, jaringan jalan, infrastruktur gedung serta transportasi. Kondisi negara lemah kerap kali diikuti dengan situasi inkongruen.

Negara inkongruen adalah kondisi dimana sebagian kelompok nasional tidak meletakkan *self-setermination* kepada teritorial administratif atau negara yang eksis, sehingga muncul aspirasi berganti afiliasi dengan merevisi batas wilayah atau membangun negara baru.⁴⁷ Negara inkongruen dapat dilihat dengan jelas apabila terdapat beberapa ciri seperti, kemunculan kelompok pemberontak atau revisionis yang ingin membentuk negara baru; terdapat lebih dari satu

⁴⁶ Lihat Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 54.

⁴⁷ Lihat Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 55.

kelompok nasional dalam satu negara; indikasi satu kelompok etnis dalam negara terpecah di beberapa negara tetangga.

1.7.1.2 Intervensi Kooperatif

Intervensi kooperatif merupakan aksi konkret beberapa negara atau non-negara dalam segala bidang⁴⁸ termasuk politik, ekonomi atau militer dengan tujuan mempengaruhi arah dan durasi konflik internal (dinamika konflik) sebagai proses pihak ketiga melalui sebuah misi kerjasama yang mendeterminasi penyelesaian konflik berupa pengajuan kedaulatan, penyelenggaraan pemerintahan demokratis, pembangunan ekonomi maupun akomodasi konflik dalam level sistemik.⁴⁹ Intervensi kooperatif memiliki indikator meliputi, kapabilitas dan kepentingan pihak-pihak intervensi yang cenderung sama (dilihat dari kekuatan ekonomi, politik dan militer serta fokus tindakan), terdapat perubahan struktur politik antara pihak-pihak yang berkonflik melalui instrumen kerjasama intervensi, adanya kerjasama diplomatik dan sinergitas kebijakan oleh intervensi, melalui kerjasama intervensi kooperatif juga memberikan pengaruh kekuatan ekonomi seperti bantuan logistik, dana pergerakan, serta sokongan kerjasama ekonomi hingga agenda koersif melalui penurunan basis militer.⁵⁰

1.7.1.3 Cold Peace

Cold peace merupakan sebuah kondisi dengan karakteristik adanya kesepakatan formal antara pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun sudah dikatakan muncul perdamaian, namun kondisi tersebut masih belum menyelesaikan persoalan

⁴⁸ Lihat Young 1967 dan Rosenau 1969 dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 70.

⁴⁹ Lihat Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 72.

⁵⁰ Dalam Boucher, *Political Theories of International Relations*. 2th ed. United States: Oxford University Press, 178.

karena kemungkinan perang masih terjadi apabila masih ada perasaan ancaman dan upaya meningkatkan *power* dari masing-masing guna mendapatkan *relative gains*.⁵¹ Indikator yang dapat menjelaskan kategorisasi *cold peace* meliputi, 1) absennya penggunaan kekuatan militer dalam konflik eskalasi besar; 2) mulai ada upaya pembangunan ekonomi, hukum dan sosial setelah konflik; 3) terdapat upaya reduksi konflik melalui mitigasi dan negosiasi; 4) hubungan luar negeri bersifat antarpemerintahan sementara; 5) masih terdapat kemungkinan perang (cenderung *cold war*) yang terlihat dari situasi struktur kekuatan, persenjataan, serta pelatihan dan jumlah anggaran pertahanan dari pihak yang bersengketa.⁵²

1.7.1.4 Partisi

Partisi merupakan kondisi pengajuan batas wilayah baru oleh bagian komunitas nasional dan menciptakan setidaknya dua unit kedaulatan dan otoritas yang berbeda dalam suatu analisis yang multidimensional.⁵³ Partisi merupakan konsep yang kompleks secara praktikal karena mengandung penjelasan indikator identitas kebangsaan, dan teritorial geopolitic, *self-determination*. Identitas kebangsaan disini termasuk etnis dan agama, teritorial geopolitic mencakup batas-batas wilayah serta kandungan sumber daya alam di kawasan, sedangkan *self-determination* merujuk pada kedaulatan wilayah baru melalui pemisahan diri. Partisi dapat terjadi akibat dinamika intervensi *great power* dalam upaya

⁵¹ Memperhatikan *relative gains* seperti kapabilitas militer dan sumber ekonomi relatif untuk memberikan ketakutan dominasi pada pihak lawan yang lebih inferior. Dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 45-46.

⁵² Lihat selengkapnya dalam tabel 2.1 “the three ideal types of regional peace”, dalam Miller, *States, Nations and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace*, 47.

⁵³ Partisi secara esensial menekankan kajian pada pembuatan batas-batas wilayah baru bagi entitas yang terlibat. Lihat Kusdev Rankin, “Theoretical Concepts of Partition and the Partitioning of Ireland” *Working Paper British Irish Studies*, 67 (February 2006): 2.

menavigasi konflik, sehingga memungkinkan sebuah entitas hilang dari peradaban atau justru memunculkan adanya negara-negara baru.⁵⁴

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan terkait beberapa variabel terhadap suatu fenomena yang saling berhubungan atau disebut juga variabel asosiasi. Tipe penelitian ini mencari hubungan sebab akibat antara variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.⁵⁵ Melalui korelasi variabel yang dikaitkan, terlihat pola, arah, sifat, bentuk maupun kekuatan hubungan sebuah fenomena. Tipe penjelasan yang digunakan peneliti adalah *interpretative explanation* yang mencoba melihat makna dari suatu peristiwa melalui penempatannya dalam satu konteks sosial yang spesifik, menyusun variabel sesuai urutan waktu serta menginterpretasikan lewat hubungan teori dan hipotesis.⁵⁶

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan jangkauan dan batasan yang dipilih oleh peneliti untuk memfokuskan suatu permasalahan pada ruang dan waktu tertentu yaitu kurun waktu tahun 1983 hingga 2011. Pemilihan jangkauan tersebut dilakukan melalui beberapa pertimbangan, tahun 1983-2005 pembahasan Sudan sebagai negara lemah dan inkongruen pada Perang Sipil II (1983-2005). Kemudian tahun 2005 dibentuk *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang menjadi indikasi intervensi kooperatif internasional secara resmi dalam konflik

⁵⁴ Rankin, "Theoretical Concepts of Partition and the Partitioning of Ireland", 24.

⁵⁵ Fenomena yang ada akan dihubungkan dalam suatu garis kausalitas melalui kajian konseptual dan berdasarkan teoritisasi yang tepat. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press, 2006), 28-9.

⁵⁶ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Eresco, 1992),13.

Sudan-Sudan Selatan. Sedangkan tahun 2011 merupakan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan melalui langkah partisi sebagai upaya penyelesaian konflik Sudan-Sudan Selatan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau studi literatur sebagai sumber data. Studi literatur merupakan proses membaca, evaluasi pengayaan definisi, kata kunci, dan terminologi yang dapat menunjang pemahaman peneliti sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat.⁵⁷ Peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel, berita di dalam koran dan media elektronik seperti internet, hingga jurnal ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti telah membaca tiga tesis, sepuluh buku, 29 jurnal internasional, 18 laman internet, satu kamus sejarah, satu laporan konferensi, satu artikel koran serta 14 laporan tahunan, meliputi PBB, organisasi internasional dan rangkuman memorandum tahunan negara Sudan. Beberapa rujukan yang digunakan peneliti selain buku antara lain adalah jurnal elektronik yang dianggap memiliki kredibilitas yakni SAGE, Princeton, JSTOR, Muse Project, Oxford, Springer, Cambridge dan Taylor Francis⁵⁸. Sedangkan artikel berbasis internet banyak dibaca peneliti dari beberapa situs utama milik organisasi internasional, seperti Global Policy

⁵⁷ Laura Roselle dan Sharon Spray, "Scholarly Literature and The Literature Review" *Research and Writing in International Relations*, 7, (Fall 2008): 17-34.

⁵⁸ Jurnal yang dirilis oleh lembaga-lembaga tersebut dianggap peneliti memiliki kredibilitas yang baik sebagai sumber literatur karena universitas-universitas atau lembaga tersebut merupakan basis akademisi sejak tahun 1700an, merupakan universitas-universitas tua di AS maupun Eropa, Oleh karena itu, artikel yang dirilis oleh lembaga-lembaga tersebut memiliki tingkat independen yang tinggi terkait dengan persoalan ilmu sosial. Lembaga-lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga publikasi internasional yang merilis jurnal dan buku melalui media elektronik dengan komitmen untuk mempublikasikan tulisan yang berkualitas dan inovatif bagi akademisi dan pelaku pasar. Justifikasi lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat dalam laman resmi.

Forum,⁵⁹ PBB dan International Crisis Group⁶⁰. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari beberapa laman berita seperti *Nuba Global Players*⁶¹ dan *Sudan Tribune News*.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal tersebut disebabkan isi dari penelitian ini mayoritas berwujud kata-kata atau rangkaian kalimat dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Data dapat diperoleh melalui berbagai macam cara yang pada akhirnya dibentuk dalam tulisan atau transkrip. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga langkah kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pemahaman dalam penarikan kesimpulan.⁶² Dalam penelitian juga akan disediakan data dalam bentuk gambar-gambar, tabel maupun grafik guna memperjelas analisis peneliti dan berfungsi untuk memperkuat fakta.

⁵⁹ Global Policy Forum menjadi sumber rujukan peneliti karena dalam organisasi tersebut dilakukan berbagai penelitian terkait pembangunan berkelanjutan, MDGs, krisis finansial global, efektivitas PBB, akuntabilitas, proses peacebuilding dalam perang serta reformasi perdamaian dunia. Kajian yang ada dilakukan setiap tahun oleh kelompok epistemik guna membangun ide yang lebih solutif dan komprehensif. Dapat dibaca selengkapnya dalam Global Policy Forum, *About Global Policy Forum*, updated in 2015 www.globalpolicy.org/about-gpf-mm/introduction.html (diakses pada Desember 17, 2014).

⁶⁰ International Crisis Group merupakan organisasi non-governmental dan non-profit yang memiliki visi untuk mencegah atau mengupayakan resolusi terhadap konflik yang menyebabkan situasi krisis serta telah melakukan berbagai operasi konkret untuk mereportase proses konflik berlangsung. Sehingga menurut peneliti tepat untuk dirujuk sebagai sumber data. Selengkapnya dapat dibaca di International Crisis Group. *About Us*, updated in 2015, www.crisisgroup.org/en/about.aspx (diakses pada Desember 12, 2014).

⁶¹ Media pemberitaan Nuba Global Players menjadi penting dalam penelitian ini sebagai sumber data karena media ini memberitakan konflik Sudan dalam konteks yang lebih dekat secara wilayah melalui artikel dan film, sehingga gambaran kondisi konflik berupaya melihat konstelasi power dari aktor-aktor dalam konflik. Dapat ditelusuri dalam Nuba Reports, *Introduction and History*, www.nubareports.org/introduction-and-history (diakses pada 17 Januari 2015).

⁶² Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pilihan-pilihan yang ada kemudian diringkas sesuai dengan pola-pola tertentu yang berguna bagi analisis. Kemudian dalam langkah penyajian data akan dilakukan pengumpulan informasi yang disusun guna memberikan kemungkinan pengambilan kesimpulan dalam upaya menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Penyajian data dapat dilakukan melalui teks naratif, grafik, matriks hingga bagan. Dan alur yang terakhir adalah proses pengambilan kesimpulan, yang akan diverifikasi dalam proses penelitian. Dalam Lihat Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 31.

1.7.6 Sistematika Penelitian

Penelitian yang berjudul “Intervensi Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Mempengaruhi Keputusan Partisi Sudan Selatan Dari Sudan Di Tahun 2011” secara sistematis dijabarkan dalam empat bab.

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan beserta kerangka pemikiran yang digunakan dan metodologi penelitian.

BAB II Menganalisa kategorisasi negara Sudan sebagai negara yang lemah dan inkongruen dalam dua periode yakni masa perang sipil II (1983-2005) dan masa proses perdamaian (2005-2011). Sudan sebagai negara lemah dan inkongruen memicu intervensi kooperatif antara AS dan Tiongkok sebagai intervener dominan dalam United Nations Mission in Sudan (UNMIS).

BAB III Menjelaskan manifestasi tipe intervensi kooperatif dua negara *great power* yakni AS dan Tiongkok melalui UNMIS dalam konflik Sudan-Sudan Selatan sehingga merujuk pada dinamika pelaksanaan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) sebagai bentuk *cold peace* melalui lima mekanisme yakni *restraint*, *reassurance*, *deterrence*, reduksi konflik serta referendum.

BAB IV Mengaitkan dinamika peranan AS dan Tiongkok melalui intervensi kooperatif UNMIS di konflik Sudan-Sudan Selatan

sebagai negara yang lemah dan inkongruen, dalam satu garis setelah berlakunya *Comprehensive Peace Agreement (CPA)*. Kemudian menarik dinamika tersebut pada variabel-variabel yang mendeterminasi keputusan partisi Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011. Sehingga dapat menjawab hipotesis dan menyuguhkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dalam bab-bab sebelumnya.

